

EVALUASI KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG (MODEL BASIS EKSPORT)

Muhammad Sendi¹, Muhammad Syahbudi²

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Email: muhammadsendi19@gmail.com¹, bode.aries@uinsu.ac.id²

Abstract

Economic development is an essential factor to development in the country because development was not just about economic phenomena but includes material and financial problems in the life many people. So that implementation of suitable policies succeed to achieve many object and purpose of effective development need good planning and evaluation. For example Deli Serdang, location quotient showed that basic sector is electricity and transportation. Based on the result the government have to take a policy that actually develop the basic sector until give a big value added to income of the city non basic sector must be develop together with basic sector because connected to economic growth.

Keywords: *Economic development, location quotient, basic sector electricity*

Abstrak

Pembangunan ekonomi merupakan faktor penting bagi pembangunan di negara ini karena pembangunan bukan hanya tentang fenomena ekonomi tetapi mencakup masalah materi dan keuangan dalam kehidupan banyak orang. Agar implementasi kebijakan yang tepat berhasil mencapai berbagai tujuan dan sasaran pembangunan yang efektif perlu perencanaan dan evaluasi yang baik. Misalnya Deli Serdang, hasil bagi lokasi menunjukkan bahwa sektor dasar adalah listrik dan transportasi. Berdasarkan hasil tersebut pemerintah harus mengambil kebijakan yang benar-benar mengembangkan sektor basis sehingga memberikan nilai tambah yang besar bagi pendapatan kota sektor non basis harus dikembangkan bersama-sama dengan sektor basis karena terhubung dengan pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: *Pembangunan ekonomi, location quotient, kelistrikan sektor dasar*

PENDAHULUAN

Kemajuan ekonomi adalah satu komponen yang esensial dari pembangunan suatu negara. Hal ini disebabkan karena pembangunan bukanlah semata-mata fenomena ekonomi, dengan pengertian yang mendasar pembangunan itu haruslah mencakup masalah-masalah materi dan finansial dalam kehidupan orang banyak (Michael P Todaro, 2000).

Sebagai salah satu negara berkembang Indonesia tengah menghadapi berbagai fenomena pembangunan baik tingkat nasional maupun daerah dimana pemerataan dan pertumbuhan merupakan dua aspek yang diinginkan bisa berjalan seiring dengan proses pembangunan yang sedang dilaksanakan. Kebijakan nasional dalam melaksanakan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai Trilogi Pembangunan, yaitu: (1) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil yang menuju pada tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat (2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan (3) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan itu saling berkaitan dan saling memperkuat atau mendukung satu sama lain (Rustian Kamaluddin, 1991).

Secara konseptual penekanan arah pembangunan terletak pada aspek pemerataan seperti yang tercermin dalam Trilogi Pembangunan, namun secara operasional konsep tersebut perlu dibicarakan lagi, terutama apabila dikaitkan dengan kebijaksanaan pemerintah, dimana porsi anggaran pembangunan sektoral yang berorientasi pada pertumbuhan jauh lebih besar dibandingkan dengan porsi pembangunan daerah atau wilayah yang lebih berorientasi pada pemerataan (Syafrizal, 2000). Pada masa orde baru model pembangunan yang dipilih oleh pemerintah adalah model pembangunan yang meletakkan pemerintah pusat sebagai perencana dan pelaksana pembangunan. Pemerintah daerah lebih berperan sebagai fasilitator dari program yang dirancang oleh pemerintah pusat. Akibatnya pembangunan yang terjadi bersifat sentralistik dan memiliki kelemahan, diantaranya adalah kurang sesuainya pembangunan yang disusun bagi daerah dengan kebutuhan, aspirasi dan karakteristik budaya setempat sehingga tidak mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Keadaan ini juga kurang merangsang kreatifitas pemerintah daerah dan aparatnya dalam upaya mencari ide-ide dan strategi pembangunan daerah untuk mendukung perkembangan daerahnya.

Desentralisasi yang berlangsung sekarang ini, yang berkaitan dengan pelaksanaan UU No.22/1999 dan UU No. 25/1999 pasti punya pengaruh terhadap aspek-aspek keadilan, atau pemerataan dan efisiensi. Dari segi pemerataan kesenjangan pendapatan antar daerah dapat diperkecil dengan meratakan ketersediaan sumber dana antar pemerintah daerah. Sementara itu dari segi efisiensi diharapkan bahwa proses desentralisasi akan mengalihkan sumber keuangan untuk pembiayaan pelayanan publik yang semula disesuaikan dengan kepentingan pusat menjadi lebih mengutamakan kepentingan daerah (Raksaka Mahi, 2000).

Dalam era otonomi sekarang ini tentunya setiap daerah akan terdorong untuk mencapai kemajuan yang lebih baik dari daerah lain karena masing-masing daerah diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi daerahnya, akibatnya persaingan antar daerah dalam bidang ekonomi juga akan semakin meningkat. Namun, bertitik tolak dari keadaan ini daerah harus berbenah dan menyiapkan diri untuk lebih mandiri dimana selama ini hal tersebut tidak dapat dilakukan, dengan kata lain daerah harus mengembangkan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri (Tulus Tambunan, 2001).

Dalam pengembangan daerahnya Kota Padang Panjang menitikberatkan dalam sektor jasa sebagai sektor yang potensial berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai tambah yang dihasilkannya. Agar pelaksanaan suatu kebijaksanaan berhasil mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan secara efektif, maka diperlukan perencanaan yang baik dan adanya suatu evaluasi terhadap kebijakan yang diambil, sehingga dapat diambil langkah-langkah dalam perencanaan selanjutnya. Mengingat potensi utama pembangunan daerah kelihatannya berada pada sektor jasa-jasa, maka pengembangan daerah merupakan strategi yang diperkirakan akan dapat meningkatkan proses pembangunan daerah secara keseluruhan (Syafrizal, 1988).

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek-aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek- aspek lingkungan dengan cara, secara terus- menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah, merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah, menyusun konsep-konsep strategi bagi pemecahan masalah dan melaksanakannya dengan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia, sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan (Syahroni, 2002).

Arah dan kebijaksanaan pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya pemecahan masalah besarnya perbedaan laju pertumbuhan antar daerah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan serta keberhasilan di berbagai sektor. Dengan demikian, kegiatan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai usaha meratakan dan menyebarluaskan pembangunan daerah dengan tujuan menyeraskan dan memperkecil perbedaan tingkat laju pertumbuhan antar daerah, serta seluruh kegiatan pembangunan di daerah dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Paradigma perencanaan pembangunan daerah yang terdesentralisasi memberikan keleluasaan dan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat dan semua pelaku di daerah untuk berpartisipasi membangun daerahnya sebagai subyek pembangunan, bukan hanya sebagai obyek pembangunan. Masyarakat daerah merencanakan sendiri pembangunan bagi dirinya sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya berdasarkan karakteristik yang spesifik dan potensi- potensi sumber daya daerah yang tersedia (Syahroni, 2002).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk kemitraan antar pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

Lebih lanjut dinyatakan bahwa masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan kebijaksanaan- kebijaksanaan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal atau daerah. Sesuai dengan UUD 1945 dan semangat reformasi yang berkembang, pembangunan daerah kini direncanakan melalui prinsip-prinsip otonomi daerah, dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang dan peranan pemerintah daerah yang semakin besar dalam perencanaan pembangunan di daerah tersebut.

Untuk merealisasikan otonomi daerah tersebut, maka pemerintah Indonesia melalui persetujuan DPR telah menetapkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dengan pemberlakuan kedua undang- undang tersebut, paradigma manajemen pemerintah daerah mengalami pergeseran

yang sangat drastis, yaitu dari yang sebelumnya serba sentralistis menuju sistem yang desentralistis. Dalam situasi demikian, pemerintah daerah dituntut dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing secara optimal (Deddy Supriady B dan Dadang S, 2004).

Menurut Mardiasmo (2000), pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, dimana kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas kepada daerah merupakan langkah strategi yang diambil oleh pemerintah dalam hal: Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal seperti kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis untuk menyongsong era globalisasi dan memperkuat basis perekonomian daerah.

Untuk itu strategi pembangunan ekonomi daerah harus mengalami beberapa perubahan penting agar sesuai dengan keadaan saat ini. Menurut Syafrizal (2000) dalam Maiza Oktalinda (2004), menyatakan strategi baru tersebut tetap searah dengan titik berat pembangunan nasional maupun daerah, yakni dalam bidang ekonomi demi mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan sekaligus untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Adapun strategi baru untuk menyikapi pembangunan ekonomi dalam era otonomi yang merujuk pada kebijaksanaan pembangunan sektor-sektor ekonomi antara lain:

- 1) Menjalankan strategi pembangunan ekonomi daerah yang berdasarkan pada prinsip keuntungan kompetitif yaitu mengkombinasikan unsur kreatifitas, teknologi dan kualitas sumber daya manusia untuk menghasilkan produk yang mempunyai daya saing yang tinggi.
- 2) Pengembangan komoditi unggulan yang diharapkan melalui kebijaksanaan ini masing-masing daerah dapat mengembangkan produk-produk utama yang mempunyai daya saing yang tinggi karena didukung oleh keuntungan komparatif daerah yang bersangkutan.
- 3) Peningkatan kemampuan teknologi daerah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi yang telah ada serta merangsang munculnya penemuan produk baru.
- 4) Pembangunan daerah sebaiknya lebih memperhatikan keunggulan dan karakteristik khusus dari setiap daerah. Pembangunan daerah juga harus meningkatkan partisipasi lokal sebagai bagian dari usaha untuk mendapatkan pendapatan perkapita masyarakat lokal. Pendapatan perkapita penduduk akan menambah daya tarik daerah tersebut untuk menarik investor baru yang pada gilirannya akan mendorong kegiatan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi yaitu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan

kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan yang tinggi merupakan kondisi yang utama demi kelangsungan ekonomi, karena penduduk bertambah terus, sehingga kebutuhan ekonomi juga bertambah maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya. Hal ini diketahui dari peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau produk domestik bruto setiap tahunnya. (Tulus Tambunan, 2001).

Menurut Robinson Tarigan, (2004), teori pertumbuhan ekonomi regional adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan ini dapat diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Pada teori pertumbuhan ekonomi nasional faktor-faktor yang sangat diperhatikan adalah modal, lapangan pekerjaan dan kemajuan. Akan tetapi, pada teori pertumbuhan ekonomi regional faktor-faktor yang mendapat perhatian utama adalah keuntungan lokasi, migrasi dan lalu lintas modal.

Teori pertumbuhan ekonomi regional pada dasarnya menjelaskan kenapa suatu daerah dapat secara cepat berkembang, sedangkan yang lainnya kurang berkembang. Selanjutnya, teori ini membahas dua faktor-faktor utama yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, yang ditentukan banyak hal baik faktor ekonomi maupun non ekonomi. Namun demikian tekanan pada studi ini adalah pada faktor ekonomi saja. Secara umum, teori ekonomi regional dapat dibagi atas empat kelompok diantaranya adalah 1) Export Base model, 2) Clasiccal Model, 3) Cummulative Causion Model, 4) Center Pheryphery Model. Pengelompokan teori ini didasarkan atas asumsi yang berbeda.

Namun untuk pembahasan studi ini model yang dipakai adalah model yang pertama yaitu model Export Base yang nantinya akan menentukan sektor-sektor perekonomian apa saja di Kota Padang Panjang yang menjadi sektor unggulan bagi daerahnya.

Teori Evaluasi Kebijakan Pem- bangunan Regional

Dalam ilmu ekonomi dikenal dengan adanya kebijaksanaan pembangunan daerah yang salah satu tujuannya adalah mengurangi perbedaan dalam tingkat perkembangan pembangunan dan kemakmuran antar daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Besar kecilnya peranan pemerintah melalui kebijaksanaan perekonomiannya akan bergantung pada sistem ekonomi negara yang bersangkutan, dimana kebijaksanaan bertujuan untuk mendorong ekonomi setiap daerah agar daerah berkembang dapat meimbangi daerah yang maju sehingga diskualitas regional dapat dikurangi.

Teknik-teknik untuk mengevaluasi kebijaksanaan regional dapat dibagi atas evaluasi mikro dan makro. Analisa dalam evaluasi mikro adalah proyek-proyek pembangunan, biasanya evaluasi dilakukan terhadap proyek –proyek besar saja. Teknik analisa yang digunakan adalah Cost Benefit Ratio (CBR) yang didasarkan pada realisasi pelaksanaan proyek. Sedangkan, dalam evaluasi makro salah satu alat analisisnya adalah dengan menggunakan analisis dampak regional. Analisis dampak regional ini menggunakan model pertumbuhan ekonomi regional basis ekspor. Dalam pembahsan yang dilakukan dengan

membandingkan nilai dampak suatu sektor bagi suatu daerah dengan nilai dampak sektor yang sama secara nasional.

Ide pokok dari teori ini menyatakan perbedaan sumber daya dan geografis dari suatu negara menyebabkan masing-masing daerah mempunyai keuntungan lokasi (keuntungan kompratif) terhadap beberapa sektor atau jenis kegiatan-kegiatan tersebut didorong pertumbuhannya maka akan dapat dijadikan sebagai leading bagi daerah yang bersangkutan.

Konsepsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode dapat dilihat dari data Produk Domestik Regional Bruto baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan (BPS, 2000). Selanjutnya BPS menyebutkan bahwa PDRB dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah unit barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat memberikan gambaran tentang nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun berjalan. Sedangkan, PDRB atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun 2000 yang dianggap sebagai harga konstan sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat juga digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan, PRDB atas dasar harga konstan 2000 dapat memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun.

Dalam rangka perhitungan PDRB, selama ini BPS melakukan dengan empat pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Produksi (Production Approach)

Dengan metode pendekatan ini bermaksud menghitung net output (hasil bersih) barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh sektor ekonomi suatu daerah selama setahun. Barang dan jasa yang diproduksi ini dinilai pada harga produsen yaitu yang terjadi transaksi pertama, dimana di dalamnya belum untuk margin (biaya) perdagangan dan transportasi, harga produsen ini digunakan untuk mengetahui berapa nilai (pendapatan) yang benar-benar diterima oleh produsen, sedangkan margin perdagangan dan transportasi tidak dimasukkan kedalam harga ini, karena sudah ditempuh pada sektor perdagangan, transportasi dan merupakan pendapatan pada sektor-sektor tersebut.

Penilaian barang dan jasa pada harga produsen ini merupakan nilai produksi bruto karena didalamnya termasuk biaya barang dan jasa yang terpakai dan dibeli dari sektor lain. Untuk menghindari perhitungan dua kali maka biaya barang dan jasa yang dibeli dari sektor ini dikeluarkan, sehingga diperoleh biaya produksi netto atau yang disebut juag dengan nilai tambah (value added). Nilai tambah ini merupakan balas jasa faktor produksi yang terdiri dari upah, gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan. Kalau nilai tambah ini ditambahkan dengan penyusutan dan pajak tak langsung netto merupakan nilai tambah atas harga pasar.

Penjumlahan dari tambah bruto atas dasar harga pasar dari semua sektor ekonomi merupakan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar dan apabila dikurangi penyusutan dan pajak tidak langsung netto akan menjadi Produk Domestik Regional Bruto atas faktor biaya.

2. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

Pendekatan secara ini dilakukan dengan cara menjumlahkan balas jasa faktor produksi yang terdiri dari upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan. Penjumlahan semua balas jasa faktor produksi yang dibayarkan oleh unit-unit yang beroperasi di wilayah itu merupakan nilai tambah netto atas dasar biaya faktor, sehingga penjumlahan semua nilai tambah ini akan menjadi Produk Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor.

3. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach)

Pendekatan dengan cara ini bermaksud untuk menghitung pengeluaran regional dengan menjumlahkan pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai golongan dalam masyarakat, adapun pengeluaran-pengeluaran itu meliputi nilai konsumsi rumah tangga maupun yayasan sosial (private nonprofit institution), nilai pembentukan modal dan ekspor netto. Dengan menghitung komponen diatas dan menjumlahkan, maka akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

4. Pendekatan Secara Alokasi (Allocation Method)

Pendekatan secara alokasi ini adalah dengan jalan memakai indikator-indikator yang dapat menunjukkan peranan propensi ini terhadap pendapatan regional. Metode ini terpaksa dilakukan, bilamana data-data tentang sektor yang dihitung tersebut kurang.

5. Teori Location Quotient

Metode Location Quotient digunakan untuk melihat sektor potensial per-ekonomian regional. Nilai LQ diperoleh dengan membandingkan antara besarnya peranan suatu sektor/industri suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara nasional. (Robinson Taringan, 2004).

Dengan mengetahui sektor potensial regional, maka dapat dilakukan spesifikasi region menurut sektor perekonomiannya. Apabila nilai Location Quotient suatu sektor lebih besar dari satu ($LQ_{ij} > 1$), maka region tersebut mempunyai potensi pada sektor yang bersangkutan dan apabila nilai $LQ < 1$, maka peranan sektor di daerah tersebut lebih kecil dari pada peranan sektor tersebut secara nasional.

Analisa LQ juga berguna sebagai petunjuk adanya keunggulan komparatif yang dapat digunakan bagi sektor-sektor yang sudah lama berkembang, sedangkan bagi sektor yang baru berkembang tidak dapat menggunakan rumusan LQ karena produk totalnya belum menggambarkan kapasitas riil daerah tersebut.

METODE

Metode Analisa Dampak Regional Basis Ekspor Analisa yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak kebijaksanaan pembangunan daerah terhadap sektor basis dalam perekonomian daerah adalah model pertumbuhan basis ekspor. Model ini menganggap bahwa pertumbuhan sektor basis akan dapat mendorong pertumbuhan suatu daerah secara keseluruhan dengan formula sebagai berikut (Richardson, 1978 dalam Maiza Oktolinda, 2004):

$$Y = S + B$$

dimana:

Y = regional income (pendapatan regional) B = sektor basis

S = sektor non basis

Persamaan (2) adalah total pendapatan suatu daerah yang merupakan penjumlahan basis. Sektor non basis merupakan fungsi yang stabil dari total pendapatan:

$$S = sY$$

dimana:

s = marginal propensity to save S = sektor non basis

Y = regional income

Dari persamaan diatas dijelaskan bahwa sektor non basis

Y = regional income

Dari persamaan diatas dijelaskan bahwa peningkatan pendapatan akan membutuhkan peningkatan penyediaan barang-barang dan jasa-jasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan empiris dimulai dari penentuan sektor-sektor basis perekonomian Kota Padang Panjang dengan menggunakan metode LQ (Location quotient). Selanjutnya dengan membandingkan nilai dampak sektor basis perekonomian Deli Serdang dengan nilai dampak sektor perekonomian propinsi Sumatera Barat akan dievaluasi dampak kebijaksanaan pembangunan sektor basis terhadap perekonomian Kabupaten Deli Serdang. Dan dengan menggunakan Trend Linear akan diperkirakan perkembangan perekonomian (PDRB) dan sektor-sektor basis per-ekonomian untuk beberapa tahun mendatang.

Penentuan Sektor Basis

Location Quotient (LQ) merupakan metode yang digunakan untuk menentukan sektor-sektor perekonomian yang dapat dijadikan sektor basis yang pada akhirnya akan menunjang perekonomian Kabupaten Deli Serdang. Suatu sektor dapat dikatakan sebagai sektor basis bagi perekonomian daerah apabila koefisien lokasi dari sektor tersebut besar dari satu ($LQ > 1$). Tabel.1 memperlihatkan nilai LQ untuk setiap sektor perekonomian Kabupaten Deli Serdang selama periode 2017-2022.

Dampak Sektor Basis terhadap Perekonomian Kabupaten Deli Serdang

Peran kebijaksanaan pembangunan yang diterapkan di Kabupaten Deli Serdang selama tahun 2017-2022 dapat dilihat dengan menguji dampak sektor-sektor basis atau yang berpotensi terhadap perekonomian secara makro. Dan juga dapat dilihat dari nilai dampak (pengganda) sektor basis terhadap total pendapatan yang diestimasi berdasarkan Model Basis Ekspor, sektor-sektor tersebut yaitu sektor listrik, sektor bangunan, sektor pengangkutan, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa. Pada penulisan ini yang lebih ditekankan adalah nilai koefisien sektor atau nilai dampak sektor basis yang diuji daripada nilai koefisien determinasi (R^2) yang memperlihatkan seberapa besar variabel independent mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependent. Apabila koefisien determinasi rendah dalam satu penelitian tidak berarti bahwa penelitian tersebut buruk jika menguji hipotesa dari teori ekonomi.

Pada metodologi penelitian secara teoritis menghubungkan nilai dampak sektor listrik, sektor bangunan, sektor pengangkutan, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa dengan pendapatan daerah yang positif. Yang berarti bahwa jika terjadi peningkatan nilai tambah dari suatu sektor akan meningkatkan total pendapatan daerah tersebut. Tetapi seberapa besar dampak dari peningkatan nilai tambah dari suatu sektor terhadap total pendapatan dari suatu daerah secara empiris dapat dijelaskan oleh nilai dampak yang didapat dari koefisien sektor yang diuji.

Proyeksi Perkembangan Perekonomian Sektor-sektor Basis Deli Serdang

Berdasarkan data-data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan trend linier, maka dapat diperkirakan perkembangan perekonomian Deli Serdang baik perkembangan PDRB maupun perkembangan sektor-sektor basisnya. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui ada lima sektor yang dapat dijadikan sektor basis perekonomian Deli Serdang yaitu, sektor listrik, sektor bangunan, sektor pengangkutan, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa.

Dari persamaan perkembangan perekonomian PDRB dapat dilihat perkembangan PDRB dan perkembangan sektor-sektor basis yang pada akhirnya dapat diproyeksikan perkembangan perekonomian. Besar kecilnya perkembangan perekonomian dan sektor-sektor basis dapat dilihat dari koefisien trendnya, karena koefisien inilah yang menunjukkan besarnya pertambahan sektor-sektor tersebut pertahunnya.

PENUTUP

Simpulan

Secara umum, hasil estimasi dengan melihat nilai dampak sektor basis Kota Padang Panjang, yaitu sektor listrik dan sektor pengangkutan, jika dibandingkan dengan nilai dampak sektor yang sama di tingkat Sumatera Barat menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah belum optimal, karena nilai dampak dari semua sektor basis di Kabupaten Deli Serdang. Kecilnya nilai dampak ini disebabkan karena sebagian besar hasil

produksi dari sektor basis hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, yang berakibat kecilnya pendapatan yang masuk ke daerah ini.

Sektor yang mempunyai nilai dampak lebih besar jika dibandingkan dengan nilai dampak sektor yang sama di tingkat Sumatera Barat, adalah sektor bangunan, sektor keuangan dan sektor jasa-jasa. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah sudah berhasil. Besarnya nilai dampak ini disebabkan karena hasil produksi dari sektor ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan daerah tersebut.

Dari pengujian empiris tentang perkembangan perekonomian dan sektor basis dengan menggunakan Trend Linear dilihat bahwa semua sektor basis termasuk pada sektor yang berkembang cepat karena memiliki Trend Linear besar dari 1000 per- tahun.

Implikasi Kebijakan

Perekonomian Kabupaten Deli Serdang perlu lebih dikembangkan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Dalam pengambilan kebijaksanaan pemerintah Deli Serdang sebaiknya lebih mengembangkan sektor basis karena sektor ini merupakan sektor yang dapat memberikan nilai tambah yang besar terhadap pendapatan daerah. Meskipun demikian pemerintah daerah juga harus mengembangkan sektor non basis dalam kebijaksanaan pembangunan. Sektor basis dan non basis harus dikembangkan secara bersamaan karena sektor basis berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, sedangkan sektor non basis berkaitan dengan ketahanan lokal.

Agar pembangunan Deli Sedang berhasil dengan baik, maka kebijaksanaan yang diambil pemerintah daerah harus terkait dengan kebijaksanaan yang diambil di tingkat propinsi maupun nasional. Dalam pengembangan perekonomian diperlukan sebuah kerangka kebijaksanaan yang terarah dan terpadu. Keterpaduan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan hasil yang sinergis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin., 1999, Pengantar Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi Daerah, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Deddy Supriady B dan Dadang S., 2004, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta
- Eva Susana., 2000, Evaluasi Kebijakan Pembangunan Regional Pendekatan Basis Ekspor, Studi Kasus Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Skripsi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta (tidak dipublikasikan).
- Forasidah, F. (2022). Quality Of Public Services at The Office of The East Banjarmasin Sub-District. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL)*, 1(4), 353–368.
<https://doi.org/10.54443/sj.v1i4.46>

- Michael P Todaro., 2000, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh, Erlangga, Jakarta.
- M Iqbal Hasan., 2003, Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif) Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- Maiza Oktolinda., 20004. Evaluasi Kebijakan Pembangunan Regional Pendekatan Basis Ekspor. Studi Kasus Kabupaten Tanah Datar, Skripsi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta, (tidak dipublikasikan).
- Richardson. H.W., 1978, Regional and Urban Economics, Penguin Books, London.
- Rustian Kamaluddin., 1991, Beberapa Aspek Kebijakan Pembangunan Daerah, Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Raksaka Mahi., 2000, Prospek Desentralisasi di Indonesia ditinjau dari Segi Pemerataan Antar Daerah dan Peningkatan Efisiensi, Analisis CISS.
- Ratna Sri Wisyastuti., 2003, Pertumbuhan Ekonomi Bangka Barat terhadap Daerah di Luar Pulau Bangka, Skripsi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta, (tidak dipublikasikan).
- Robinson Tarigan., 2004, Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Syafrizal, 1988, Memelihara Momentum Pembangunan. Gramedia, Jakarta. Syafrizal., 2000, Teori Ekonomi Regional (Diklat), FE Universitas Andalas, Padang.
- Syahroni., 2002, Pengertian Dasar dan Genetik tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Makalah), Jakarta.
- Tulus Tambunan., 2001, Transpormasi Ekonomi di Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.

